

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan sistem pengendalian intern dalam unsur lingkungan pengendalian pada pengelolaan dana PEM Kelurahan Fatululi adalah sebagai berikut :

1. Didalam lingkungan pengendalian tidak ada ketegasan dari pimpinan dalam hal jaminan yang diberikan kepada calon penerima dana PEM tidak kuat sehingga dalam pelaksanaan penagihan masyarakat tidak terikat dengan perjanjian yang ada.
2. Tidak ada pengawasan terkait dalam hal ini inspektorat dan kejaksaan sehingga masyarakat menganggap bahwa tidak ada hukum yang mengikat.
3. Data perguliran dana PEM pada kepemimpinan lama tidak terdeteksi sehingga ini menjadi salah satu hambatan dalam proses penagihan dana PEM pada pemimpin yang baru.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi Inspektorat atau Bappeda harus ada aparat pengawas untuk lebih tegas dalam mengawasi setiap operasional dari LPM sehingga dalam pengelolaan dana PEM dapat terealisasi dengan baik.
2. Bagi LPM harus memiliki kearsipan data penerima dana PEM yang lengkap

dalam pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) sehingga dalam pelaksanaan penagihan kepada penerima dana PEM tidak ada kekeliruan dalam hal jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana yang nantinya akan dikembalikan kepada LPM.

3. Bagi ketua LPM harus lebih tegas dan konsisten dalam kebijakan penagihan terhadap penerima dana PEM serta harus memiliki jaminan yang harus kuat dari penerima dana PEM kepada LPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, G.P., & Riharjo, I.B. (2016) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5 (4).
- Anggraini, L., Zulbaridar, Z., & Fauzah, N. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se Sumatera)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Berita itjen. (2017) *Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI*. dari <https://itjen.kemkes.go.id/berita/detail/implementasi>
- Bida, S. D. A. ., Tameno, N., & Kiak, N. T. (2021). *Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang*. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 18(2), 46-52.
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dina Kesehatan Kabupaten Madiun)*. *Wacana Journal Of Social And Humanity Studies*, 15(3), 1-9.
- <https://www.indolok.id/blog/Sistem-Penyimpanan-Arsip-yang-Efektif-untuk-Memaksimalkan-Dokumentasi>. *Tentang sistem penyimpanan arsip yang efektif untuk memaksimalkan dokumentasi*.
- Kabupaten Soppeng. (2017) *Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. dari <https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>. Diakses pada 14 Desember 2021 pukul 05:10.
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 15a/Kep/Hk/2013 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013*.
- Kiu, Y.M. (2018). *EVALUASI DAMPAK PROGRAM DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN KAYU PUTIH KOTA KUPANG*. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 100-112.
- NTT Online. (2018) *Ada 10 kelurahan menunggak dana PEM diatas Rp100juta*. Dari <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2018/01/03/ada-10-kelurahan-menunggak-dana-pem-diatas-rp100-juta/>. Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 19:24.

Pangesti, Aisyah, dkk (2020). *Makalah Akuntansi Sektor Publik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

[pengendalianintern di lingkungan kementerian kesehatan ri#:~:text=SPIP%20terdiri%20atas%20lima%20unsur,integral%20dari%20kegiatan%20Ins tansi%20Pemerintah](#). Diakses pada 20 Oktober 2021 pukul, 13:00.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).*

Radar NTT. (2019) *Pemkot Kupang Evaluasi Dana PEM 2019.* Dari <https://radarntt.co/daerah/2019/pemkot-kupang-evaluasi-dana-pem2019/#:~:text=Dana%20PEM%20merupakan%20dana%20hibah,digunakan%20untuk%20kepentingan%20pemberdayaan%20ekonomi>.Diakses pada 24 Mei 2021 pukul 19:01.

Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 56 ayat 4 *tentang Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat 1 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 *tentang otonomi daerah.*

Warren. (2023) *kelemahan sistem pengendalian intern*